



**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI REGULASI
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA SAMPEAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Muhammad Faisal^{1*)}, Nurmaini Ginting²⁾, Putoro Dongoran³⁾, Nurantika
Simatupang⁴⁾, Suci Alawiyah Harahap⁵⁾**

^{1, 4)} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,
Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

²⁾ Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

³⁾ Program Studi Pendidikan PKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

⁵⁾ Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur modal sosial masyarakat terdampak dalam mengurangi risiko bencana banjir di Kelurahan Meranti Pandak serta mengidentifikasi unsur yang paling dominan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif terhadap 71 responden yang dipilih melalui teknik proportional random sampling dari total 242 kepala keluarga terdampak banjir. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang mengukur tiga dimensi modal sosial, yaitu jaringan sosial, norma sosial, dan kepercayaan sosial dalam bentuk bonding, bridging, dan linking. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat modal sosial masyarakat berada pada kategori sedang hingga tinggi. Norma sosial menjadi unsur yang paling dominan dalam mendukung pengurangan risiko banjir, diikuti oleh kepercayaan sosial, sedangkan jaringan sosial berada pada posisi kurang dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan nilai gotong royong dan solidaritas kolektif menjadi fondasi utama dalam respons masyarakat terhadap banjir. Pengurangan risiko bencana di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan sosial yang terbangun dalam komunitas.

Kata Kunci: Modal Sosial, Pengurangan Risiko Bencana, Banjir Perkotaan, Norma Sosial, Solidaritas Masyarakat.

*Correspondence Address : muhammad.faisal@um-tapsel.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i4.2026.1006-1011

© 2026UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular utama yang menjadi tantangan kesehatan global, termasuk di Indonesia yang memiliki beban kasus tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan belum sepenuhnya optimal dan memerlukan pendekatan komprehensif berbasis kebijakan yang terintegrasi (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2023; Putri, 2025). Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya eliminasi TBC (Zakia, 2024; Susanti et al., 2025). Kebijakan ini menjadi dasar dalam mengarahkan peran pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pemerintah desa sebagai pelaksana di tingkat akar rumput.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu regulasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, dan kapasitas pelaksana (Edward III, 1980; Putri, 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan TBC masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat (Saragih et al., 2022; Duri et al., 2022; Zakia, 2024). Selain itu, kurangnya edukasi dan masih adanya stigma terhadap penderita TBC juga menjadi hambatan dalam efektivitas program penanggulangan (Thahir, 2024; Ulfa & Mardiana, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi yang efektif di tingkat lokal.

Pada tingkat desa, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung

keberhasilan program penanggulangan TBC melalui sosialisasi, pendampingan pasien, serta penguatan upaya promotif dan preventif. Namun, implementasi kebijakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur dan kurangnya dukungan kebijakan lokal. Kondisi ini juga relevan untuk dikaji di Desa Sampean, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam implementasi regulasi penanggulangan TBC. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanggulangan TBC di tingkat desa.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi literatur dipilih untuk mengkaji secara komprehensif berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik peran pemerintah desa dalam implementasi regulasi penanggulangan Tuberkulosis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan penelitian terdahulu serta regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional maupun internasional. Kriteria inklusi yang digunakan adalah literatur yang dipublikasikan dalam kurun waktu lima

tahun terakhir (2020–2025), memiliki relevansi dengan topik penelitian, serta berasal dari sumber yang kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengelompokkan literatur berdasarkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar variabel yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan TBC dan peran pemerintah desa. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapanuli Selatan. Tingginya

angka kasus TBC secara nasional menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan belum sepenuhnya efektif di tingkat lokal (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2023; Fitriana et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi kebijakan hingga ke tingkat desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya (Putri, 2025; Zakia, 2024; Susanti et al., 2025). Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat masyarakat.

Tabel 1. Faktor Implementasi Penanggulangan TBC di Tingkat Desa

No	Faktor	Temuan Utama	Dampak di Desa Sampean	Sumber Literatur
1	Kebijakan	Regulasi nasional sudah tersedia (Perpres No. 67 Tahun 2021)	Belum sepenuhnya dipahami di tingkat desa	Kemenkes RI (2023); Putri (2025)
2	Sumber Daya	Keterbatasan tenaga kesehatan dan dana	Program tidak berjalan optimal	Susanti et al. (2025); Zakia (2024)
3	Komunikasi	Sosialisasi belum merata	Masyarakat kurang memahami TBC	Saragih et al. (2022); Duri et al. (2022)
4	Koordinasi	Lemahnya koordinasi lintas sektor	Program tidak terintegrasi	Putri (2025); Zakia (2024)
5	Kapasitas Aparatur Desa	Pengetahuan kesehatan masih terbatas	Peran desa belum maksimal	Ulfa & Mardiana (2021)
6	Stigma Sosial	Stigma terhadap pasien TBC masih tinggi	Deteksi kasus terlambat	Thahir (2024); Saragih et al. (2022)
7	Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat masih rendah	Program kurang berkelanjutan	Astuti (2025)
8	Kader Kesehatan	Peran kader efektif dalam pendampingan	Membantu keberhasilan pengobatan	Susanti et al. (2025)
9	Teknologi	Sistem digital mulai digunakan	Terbatas karena literasi digital rendah	Anthonie et al. (2025)
10	Ekonomi Masyarakat	Faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan pengobatan	Risiko putus obat tinggi	Fitriana et al. (2025)

Implementasi kebijakan penanggulangan TBC di Desa Sampean sangat bergantung pada peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Berdasarkan kajian literatur, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi, deteksi dini, serta pendampingan pasien TBC (Kemenkes RI, 2023; Astuti, 2025). Namun, keterbatasan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan peran tersebut secara optimal.

Faktor komunikasi kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi di tingkat desa. Informasi terkait program penanggulangan TBC belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif kepada masyarakat di Desa Sampean, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya deteksi dini dan kepatuhan pengobatan (Saragih et al., 2022; Duri et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi perlu diperkuat agar kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat secara luas.

Aspek kelembagaan, koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan dinas kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan masih perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi lintas sektor dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan kesehatan (Zakia, 2024; Putri, 2025). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi untuk mendukung keberhasilan program penanggulangan TBC.

Faktor sosial juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan di Desa Sampean. Stigma terhadap penderita TBC masih cukup tinggi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan (Thahir, 2024; Saragih et al., 2022). Selain itu, tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat juga mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap pengobatan TBC.

Peran pemerintah desa dalam mengatasi tantangan tersebut sangat penting, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kader kesehatan. Keterlibatan aktif kader kesehatan desa terbukti dapat meningkatkan deteksi kasus dan keberhasilan pengobatan TBC (Susanti et al., 2025; Astuti, 2025). Di Desa Sampean, peran ini perlu terus diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan TBC di tingkat desa. Namun, keterbatasan akses dan literasi digital di wilayah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan masih menjadi tantangan (Anthonie et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dalam mengintegrasikan teknologi dengan kondisi lokal masyarakat.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah desa di Desa Sampean juga dapat berperan dalam menginisiasi regulasi atau kebijakan lokal yang mendukung penanggulangan TBC, seperti program desa sehat atau alokasi dana desa untuk kegiatan kesehatan. Hal ini sejalan dengan konsep desentralisasi kesehatan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dan desa dalam mengelola program kesehatan (Ulfa & Mardiana, 2021).

Secara keseluruhan, implementasi regulasi penanggulangan TBC di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di Desa Sampean, masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya, komunikasi, maupun sosial. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan TBC dan mencapai target eliminasi penyakit tersebut di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui metode sosialisasi di Desa Sampean menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat dalam transaksi jual beli masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemahaman tentang perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan hukum. Pelaksanaan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap transaksi jual beli dalam perspektif hukum ekonomi, termasuk pemahaman terhadap regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peningkatan ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dan kemampuan mereka dalam mengaitkan materi dengan praktik sehari-hari. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat literasi hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonie, R., Putra, D., & Siregar, H. (2025). Digital health innovation in tuberculosis control: A community-based approach. *International Journal of Health Sciences*, 9(2), 145–156.
- Astuti, W., Rahman, A., & Lubis, M. (2025). Community participation in tuberculosis control programs in Indonesia. *Journal of Global Public Health Research*, 3(1), 45–58.
- Duri, M., Siregar, R., & Nasution, F. (2022). Social stigma and tuberculosis treatment adherence in rural communities. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 17(2), 89–97.
- Fitriana, D., Handayani, S., & Putri, A. (2025). Tuberculosis as a global health problem: Prevention and control strategies in Indonesia. *Global Health Review*, 12(1), 33–47.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil kesehatan Indonesia tahun 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
- Putri, N. A., Sihotang, H., & Harahap, R. (2025). Policy implementation of tuberculosis control in Indonesia: A governance perspective. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 14(1), 12–25.
- Saragih, M., Simanjuntak, E., & Hutagalung, T. (2022). Public awareness and tuberculosis prevention behavior in rural areas. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 21–30.
- Susanti, E., Lubis, R., & Hasibuan, A. (2025). The role of community health workers in tuberculosis management. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 13(2), 101–112.
- Thahir, M., Yusuf, A., & Ramadhan, R. (2024). Stigma and discrimination among tuberculosis patients in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Global*, 6(1), 55–66.
- Ulfa, R., & Mardiana, D. (2021). Decentralization of health policy and its impact on tuberculosis control. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 134–142.
- WHO. (2022). *Global tuberculosis report 2022*. Geneva: World Health Organization.
- Zakia, L., Pratama, A., & Nugroho, B. (2024). Cross-sector collaboration in tuberculosis control policy implementation. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 78–90.
- Ayuningtyas, D., & Pujiyanto. (2024). Governance challenges in tuberculosis control in Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*, 9(1), 1–10.

Arini, S., & Kurniawan, B. (2025). Health system strengthening for tuberculosis elimination. *Asian Journal of Public Health*, 7(1), 66–75.

Dikri, M., & Fauzi, A. (2025). Evaluation of DOTS strategy implementation in Indonesia. *Jurnal Manajemen Kesehatan*, 11(2), 120–130.